

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. LKPJ dimaksud berisikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah.

Adapun ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan : Urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. LKPJ terdiri atas : LKPJ Akhir Tahun Anggaran yang disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir masa Jabatan.

1. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

- 1) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepada Masyarakat.

2. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dasar Hukum pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

3. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Dasar hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Nama Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah nama Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

5. Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan (Wajib/Pilihan)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, Unsur Pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara

administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

6. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)

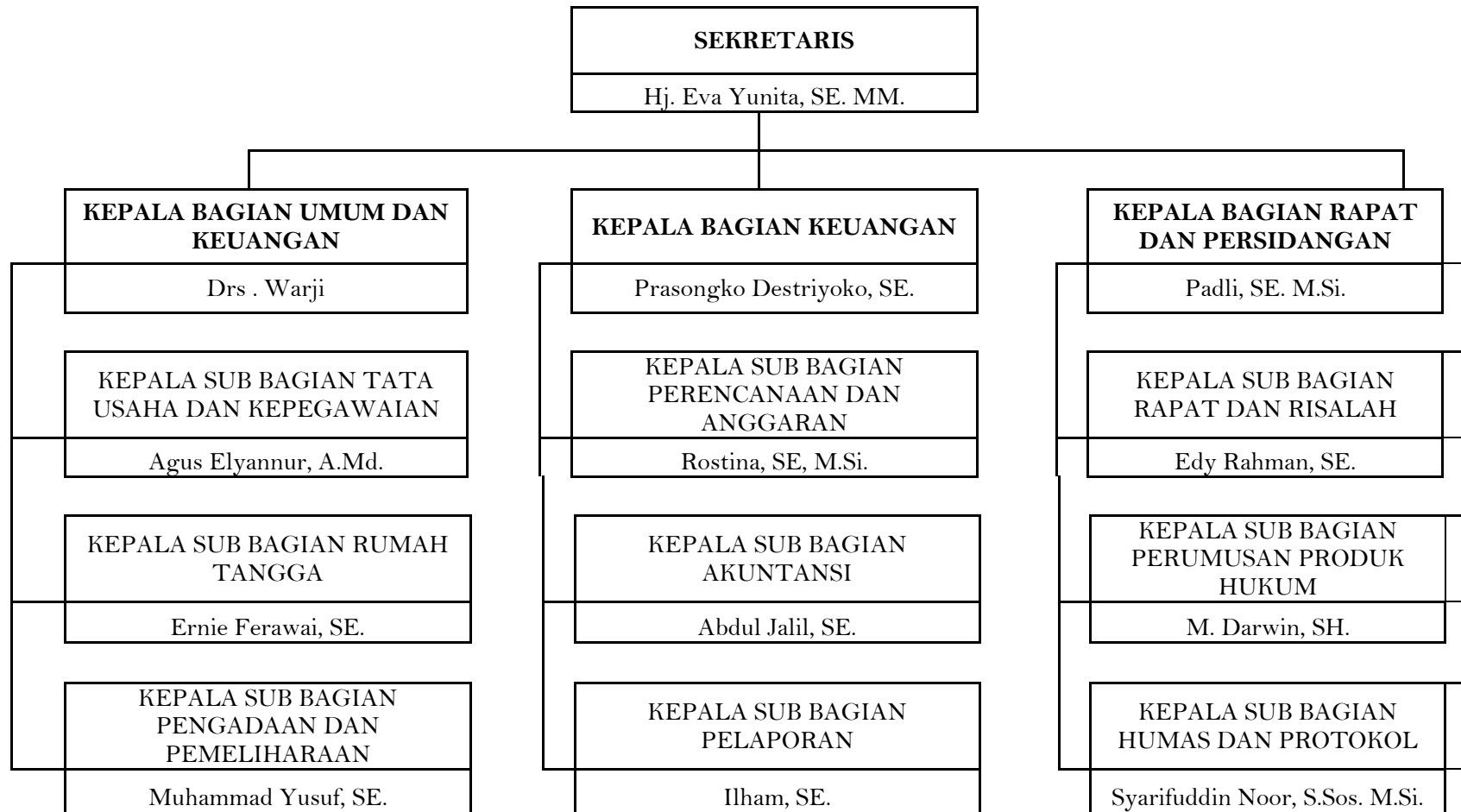
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Bagian Rumah Tangga
 3. Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan
- c. Bagian Keuangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
 2. Sub Bagian Pelaporan
 3. Sub Bagian Akuntansi
- d. Bagian Rapat dan Persidangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah
 2. Sub Bagian Perumusan Produk Hukum
 3. Sub Bagian Humas dan Protokol
- e. Kelompok Jabatan Fungsional:

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**





LAPORAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BERAUPERIODE 31 DESEMBER 2021

NO	NAMA PEGAWAI / TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA	LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN AKHIR	
			GOL RU	TMT	ES.	NAMA JABATAN	TMT	TAHU N BULAN	NAMA	TAH UN	NAMA JURUSAN	THN LULUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hj. EVA YUNITA, SE. MM. PULAU DERAWAN, 26/09/1968	196809261995032001	IV/c	01/10/2019	II-B	SEKRETARIS DPRD	17/12/201 8	26 Thn. 10 Bln	Diklatpim II PKN	2020	S2- Manajemen Pemasaran	2002
2	Drs. WARJI KUTAI, 23/12/1967	196712231990031006	IV/b	01/04/2011	III-A	KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	03/01/201 7	31 Thn. 10 Bln.	Diklatpim III	2007	S-1/Sarjana IIP	1997
3	PRASONGKO DESTRIYOKO, SE NGANJUK, 04/12/1963	196312041997031001	IV/b	01/10/2013	III-A	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	03/01/201 7	24 Thn. 10 Bln.	Diklatpim III	2009	S-1/Sarjana Ilmu Ekonomi	1992
4	ROSTINA, S.Sos. M.Si. LONG LAAI, 09/10/1975	197510092002122006	IV/a	29/03/2018	IV-A	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN	11/10/201 9	19 Thn. 1 Bln.	Diklatpim IV	2013	S-2 Administrasi Publik	2012
5	PADLI, SE. M.Si ULINGAN, 17/07/1968	196807171997111001	IV/a	01/04/2018	III-A	KEPALA BAGIAN RAPAT DAN PERSIDANGAN	17/12/201 8	24 Thn. 2 Bln.	Diklatpim IV	2000	S2-Sains	2017
6	ABDUL JALIL, SE TALISAYAN, 10/07/1980	198007101999031001	III/d	01/04/2018	IV-A	KEPALA SUB BAGIAN AKUTANSI	03/01/202 0	22 Thn. 10 Bln.	-		S-1/ Sarjana Ekonomi	2005
7	ILHAM, SE BERAU, 18/02/1976	197602182007011009	III/d	01/10/2018	IV-A	KEPALA SUB BAGIAN PELAPORAN	01/03/201 7	15 Thn. 0 Bln.	Diklatpim IV	2017	S-1/ Sarjana Ilmu Ekonomi	2003
8	ERNI FERAWATI, SE. ME BERAU, 24/08/1980	198008242007012012	III/d	01/04/2019	IV-A	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	17/12/201 8	15 Thn. 0 Bln.	-		S-2 Ilmu Ekonomi	2019

LKPJ 2021

9	AGUS ELYANNUR, A.Md	197208081995032002	III/d	01/10/2019	IV-A	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	17/12/201 8	26 Thn. 10 Bln	-		Diploma III/ Sarjana Muda Manajemen	1994
	BERAU, 08/08/1972											
10	SYARIFUDDIN NOOR, S.Sos. M.Si TANJUNG REDEB, 07/05/1984	198405072010011009	III/c	01/04/2018	IV-A	KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	03/01/202 0	12 Thn. 0 Bln.	-		S2-Adm. Pemerintahan Daerah	2017
11	MUHAMMAD DARWIN, SH TANJUNG REDEB, 16/10/1983	198310162010011008	III/c	03/01/2020	IV-A	KEPALA SUB BAGIAN PERUMUSAN DAN PRODUK HUKUM	03/01/202 0	12 Thn. 0 Bln.	-		S-1/Sarjana Ilmu Hukum	2006
12	HETTIE CHRISTINAWATIE, SE. ME TANJUNG REDEB, 25/12/1979	197912252007012018	III/c	01/04/2020	Non Eselon	PENGOLAH DATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN	23/12/201 9	15 Thn. 0 Bln.			S-2 Ilmu Ekonomi	2018
13	EDDY RAHMAN, SE TANJUNG REDEB, 12/02/1982	198212022002121005	III/c	01/10/2020	IV-A	KEPALA SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	17/12/201 8	19 Thn. 1 Bln.	-		S-1/ Sarjana Ekonomi Pembangunan	2009
14	MUHAMMAD YUSUF, SE BERAU, 01/04/1980	198004012007011008	III/c	01/10/2020	IV-A	KEPALA SUB BAGIAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN	17/12/201 8	15 Thn. 0 Bln.	-		S-1/Sarjana Ilmu Ekonomi	2015
15	BOBBY ARIANTO, SE SAMBALIUNG, 06/06/1974	197406062007011018	III/c	01/10/2020	Non Eselon	BENDAHARA	02/01/201 8	15 Thn. 6 Bln.			S-2 Ilmu Ekonomi	2019
16	ELVIANI SE.ME TANJUNG REDEB, 21/05/1985	198505212005022002	III/c	01/10/2020	Non Eselon	PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARA N SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAGIAN KEUANGAN	02/01/201 8	16 Thn. 11 Bln.			S-2 Ilmu Ekonomi	2019
17	YUSRI, SE BERAU, 04/02/1976	197604021998031000	III/b	01/04/2021	Non Eselon	PENATA KEUANGAN	02/01/201 8	23 Thn. 10 Bln.			S-1/Sarjana lmu Ekonomi	2015
18	NUGRIANI SUHARYANTI SURABAYA, 04/05/1966	196604051993032009	III/b	01/04/2012	Non Eselon	PENGADMINIST RASI UMUM	02/01/201 8	28 Thn. 10 Bln.			SLTA Kejuruan	1984
19	EDY HERMANUDDIN, SE	197904302007011010	III/b	01/04/2018	Non Eselon		02/01/201 8	15 Thn. 0 Bln.			S-1/Sarjana lmu Ekonomi	2012

LKPJ 2021

	TELUK BAYUR, 30/04/1979					ANALIS LAYANAN UMUM						
20	ANWAR BASRI, SE	198110022008011013	III/b	10/04/2018	Non Eselon	PENATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER	02/01/201 8	14 Thn. 0 Bln.			S-1/Sarjana Ilmu Ekonomi	2015
	PINRANG, 02/10/1981											
21	NURMALA LASAKA GORONTALO, 10/08/1965	196508101999032006	III/b	01/04/2019	Non Eselon	PENGADMINIST RASI KEUANGAN	02/01/201 8	22 Thn. 10 Bln.			SLTA	1983
22	BAKTIANNUR, A.Md SAMARINDA, 09/03/1972	197203091996031004	III/b	01/04/2019	Non Eselon	PENGOLAH DATA	02/01/201 8	25 Thn. 10 Bln.			Diploma III/ Sarjana Muda Manajemen	2010
23	SRI WAHYUNI SY, SE TANJUNG REDEB, 20/06/1976	197606202007012022	III/b	01/10/2019	Non Eselon	PENGADMINIST RASI RAPAT	02/01/201 8	15 Thn. 0 Bln.			S-1/ Sarjana Ekonomi Pembangunan	2011
24	MAKMUR UJUNG PANDANG, 14/03/1970	197003142000031000	III/b	01/10/2020	Non Eselon	PENGADMINIST RASI HUKUM	02/01/201 8	21 Thn. 10 Bln.			SLTA	1991
25	IDA RUSTINI, A.Md TANJUNG REDEB, 26/07/1976	197607262008012015	III/b	01/10/2020	Non Eselon	PENGADMINIST RASI RAPAT	02/01/201 8	14 Thn. 0 Bln.			Diploma III/ Sarjana Muda	2014
26	YUANA BERTA BERAU, 03/10/1970	197010032000121004	III/a	01/04/2017	Non Eselon	PENGADMINIST RASI KEUANGAN	02/01/201 9	21 Thn. 1 Bln.			SLTA Kejuruan	1990
27	EFRAN NOFYAR, SE TANJUNG REDEB, 21/01/1979	197901212007011007	III/a	01/04/2018	Non Eselon	PENGOLAH DATA SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN	02/01/201 8	15 Thn. 0 Bln.			S-1/Sarjana Ilmu Ekonomi	2017
28	MOCHRAM, SE MUARA LESAN, 08/11/1974	197411082008011019	III/a	01/10/2018	Non Eselon	PENGOLAH DATA	02/01/201 9	14 Thn. 0 Bln.			S-1/Sarjana Ilmu Ekonomi	2014
29	LALU MUHAMMAD ZAHIRUDIN, S.IP JENGGUAR, 03/07/1985	198507032005011003	III/a	01/10/2018	Non Eselon	PENYUSUN RISALAH	02/01/201 8	17 Thn. 0 Bln.			S-1/Sarjana Ilmu Pemerintahan	2015
30	MASDAR SYAHRANI, SE TANJUNG REDEB, 22/07/1975	197507222007011011	III/a	01/04/2019	Non Eselon	PENGELOLA LAPORAN BMN DAN RUMAH TANGGA POS DAN INFORMATIKA	02/01/201 8	15 Thn. 0 Bln.			S-1/Sarjana Ilmu Ekonomi	2015
31	NURHASANAH, S.AP	198512212010122002	III/a	01/10/2019								2014

LKPJ 2021

	JAKARTA, 21/12/1985				Non Eselon	ANALIS SDM APARATUR	02/01/2018	11 Thn. 1 Bln.			S-1/ Sarjana Administrasi Publik	
32	ERWIN ALFIAN, S. ST	198908042019031000	III/a	01/03/2020	Non Eselon	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	02/01/2018	2 Thn. 10 Bln.			Diploma IV TEKNIK INFORMATIKA	2012
	GIRING - GIRING, 21/12/1985											
33	JULIADI TANJUNG REDEB, 01/07/1975	197507012002121005	III/a	01/04/2020	Non Eselon	AJUDAN	01/04/2020	19 Thn. 1 Bln.			SLTA Kejuruan	1993
34	MUHAMMAD ALPIN NOOR SAMARINDA, 24/07/1976	197607242010011001	III/a	01/04/2020	Non Eselon	PENYUSUN RISALAH RAPAT	01/04/2020	12 Thn. 0 Bln.			SLTA	1995
35	JUNAWAN PULAU DERAWAN, 20/10/1979	197910202002121005	III/a	01/04/2020	Non Eselon	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	01/04/2020	19 Thn. 1 Bln.			SLTA	1997
36	CHAIRIL ANWAR, SE BERAU, 28/12/1978	197812282007011012	III/a	01/10/2020	Non Eselon	PENYUSUN RISALAH S	01/04/2019	12 Thn. 9 Bln.			S1 Ekonomi	2010
37	MIRANTI RIZKY YANITA, SH BERAU, 13/06/1995	199506132020122000	III/a	01/12/2020	Non Eselon	ANALIS LEGISLASI	01/12/2020	0 Thn. 0 Bln.			S1 Ilmu Hukum	2018
38	AGUS S LOA KULU, 15/08/1976	197608152006041013	II/d	01/04/2018	Non Eselon	AJUDAN	01/10/2019	15 Thn. 9 Bln.			SLTA	1995
39	BUDI DARMAWAN TANJUNG REDEB, 16/12/1974	197412162007011005	II/d	01/04/2019	Non Eselon	PENGEMUDI	02/01/2015	15 Thn. 0 Bln.			SLTA	1994
40	BURHANSYAH GUNUNG TABUR, 05/08/1974	197408052007011021	II/d	01/04/2019	Non Eselon	PENGADMINISTRASI UMUM	02/01/2018	15 Thn. 0 Bln.			SLTA	1994
41	BUNA SAHABUDDIN TABALAR, 13/04/1974	197404132007011011	II/d	01/04/2019	Non Eselon	PENGADMINISTRASI HUKUM	02/01/2018	15 Thn. 0 Bln.			SLTA	1994
42	TUTI HAIRIANA	197807162007012018	II/d	01/04/2019							SLTA	1995

LKPJ 2021

	TANJUNG REDEB, 16/07/1978				Non Eselon	PENGADMINIST RASI SARANA DAN PRASARANA	02/01/201 8	15 Thn. 0 Bln.				
43	ERNIS ATMAJA	197705032007011025	II/d	01/04/2019	Non Eselon	PENGADMINIST RASI ANALISIS DAN KEMITRAAN MEDIA	03/01/200 9	13 Thn. 9 Bln.			SLTA	1998
	BERAU, 03/05/1977											
44	EDY SYAFRIANNOR BERAU, 27/05/1972	197205272007011015	II/d	01/10/2019	Non Eselon	PENGADMINIST RASI SARANA DAN PRASARANA	02/01/201 8	13 Thn. 9 Bln.			SLTA	1995
45	ALIANSYAH SD BATU-BATU, 11/04/1975	197504112008011014	II/d	01/04/2020	Non Eselon	PENGADMINIST RASI RAPAT	01/04/202 0	12 Thn. 9 Bln.			SLTA	1994
46	ERWIN AGUS FARHAN BERAU, 25/08/1976	197608252008011019	II/d	01/04/2020	Non Eselon	PENGADMINIST RASI ANALISIS DAN KEMITRAAN MEDIA	01/04/202 0	12 Thn. 9 Bln.			SLTA	1995
47	HAMBALI GUNUNG TABUR, 28/02/1983	198302282008011007	II/d	01/04/2020	Non Eselon	PENGADMINIST RASI RAPAT	01/04/202 0	12 Thn. 9 Bln.			SLTA	1999
48	JUNAIDI TELUK, 08/10/1974	197410082008011010	II/d	01/04/2020	Non Eselon	PENGADMINIST RASI SARANA DAN PRASARANA	01/04/202 0	12 Thn. 9 Bln.			SLTA	2003
49	JOKO SUSILO LABANAN, 09/09/1984	198409092009011002	II/c	01/04/2017	Non Eselon	PENGADMINIST RASI SARANA DAN PRASARANA	01/03/202 1	13 Thn. 0 Bln.			SMEA Manajemen	2003
50	SURIANSYAH TELUK BAYUR, 06/03/1970	197003062008011022	II/c	01/04/2017	Non Eselon	PENGADMINIST RASI KEPEGAWAIAN	02/01/201 8	12 Thn. 9 Bln.			SLTA Kejuruan	1995
51	HASPIANI BELALANG, 03/10/1982	198210032009012002	II/c	01/04/2017	Non Eselon	PENGADMINIST RASI KEUANGAN	02/01/201 8	11 Thn. 9 Bln.			SLTA	2000
52	SANTI SAFITRI GUNUNG TABUR, 14/02/1979	197902142010012016	II/c	01/04/2018	Non Eselon	PENGADMINIST RASI UMUM	02/01/201 8	10 Thn. 9 Bln.			SLTA Kejuruan	1997
53	YUSNI ARIANSYAH TANJUNG REDEB, 08/09/1981	198109082009011004	II/c	01/04/2018	Non Eselon	PENGADMINIST RASI LAYANAN PENGADAAN	02/01/201 8	11 Thn. 9 Bln.			SLTA	1999

LKPJ 2021

						SECARA ELEKTRONIK S						
54	TARRALITA YULIANDRI SAMARINDA, 08/07/1984	198407082010012026	II/c	01/04/2018	Non Eselon	PENGADMINISTRASI ANALISIS DAN KEMITRAAN MEDIA	02/01/2018	10 Thn. 9 Bln.			SLTA Kejuruan	2002
55	SAPARUDDIN TELUK BAYUR, 28/03/1973	197303282008011018	II/c	01/04/2020	Non Eselon	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	01/04/2020	12 Thn. 9 Bln.			SLTA	1997
56	RIJAL EFFENDY TANJUNG REDEB, 06/11/1978	197811062009011007	II/c	01/04/2020	Non Eselon	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	01/04/2020	11 Thn. 9 Bln.			SLTA	1998
57	ADE RAHMAD HIDAYAT, A.Md TANJUNG REDEB, 05/05/1988	198805052020121000	II/c	01/12/2020	Non Eselon	PENGOLAH DATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN	01/12/2020	03 Thn. 0 Bln.			DIII Manajemen Informatika	2010
58	RAMDAN TELAGA LANGSAT, 17/01/1971	197101172007011015	I/d	01/04/2019	Non Eselon	PENATA PASUKAN PENGAMANAN DALAM	02/01/2018	13 Thn. 9 Bln.			SD	2018
59	FRANSISKUS JONI JURMANSA WOLOARA, 16/09/1984	198409162008011004	I/d	01/04/2020	Non Eselon	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	01/04/2020	12 Thn. 9 Bln.			SLTP	2004

BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021

No		Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
I			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.571.002.824
	I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	146.620.500
		1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	146.620.500
	2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.777.675.241
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.699.833.333
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.077.842.088
	3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.340.393.300
		1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80.400.000
		2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.259.993.300
	4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.574.499.400
		1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	33.470.000
		2 Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	639.816.000
		3 Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000
		4 Penyediaan bahan logistic kantor	425.684.500
		5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	205.993.700
		6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.259.353.200
	5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.633.737.700
		1 Penyediaan surat menyurat	4.200.000
		2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	753.360.000
		3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	233.615.700
		4 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	642.562.000
	6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.231.442.200
		1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	795.410.200

	2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	278.016.000
	3	Pemeliharaan asset tetap lainnya	158.016.000
7		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	20.736.913.103
	1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	19.890.482.703
	2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	182.136.000
	3	Pelaksanaan medical check up DPRD	664.294.4000
8		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	7.129.721.200
	1	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	5.218.322.000
	2	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	1.911.399.200
1		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18.466.643.616
		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	3.599.370.400
	1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	3.599.370.400
2		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	2.060.041.000
	1	Pembahasan KUA dan PPAS	95.039.600
	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	95.046.600
	3	Pembahasan APBD	1.224.988.000
	4	Pembahasan APBD Perubahan	474.992.200
	5	Pembahasan Laporan semester	19.980.800
	6	Pembahasan pertanggungjawaban	149.993.800
3		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	2.723.758.116
	1	Bimbingan Teknis	1.898.925.000
	2	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	469.899.016
	3	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	324.960.300
	4	Penyusunan program kerja DPRD	29.983.800
4		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	4.643.963.100
	1	Kunjungan kerja dalam daerah	580.869.500
	2	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	4.063.093.600
	3	Pelaksanaan reses	
5		PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	189.995.200
	1	Pengawasan kode etik DPRD	189.995.200
6		FASILITASI TUGAS DPRD	5.249.505.800
	1	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	4.032.743.900
	2	Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	916.942.600
	3	Fasilitasi tugas impinan DPRD	299.819.300

2. Program Prioritas OPD dan Realisasi Tahun 2021 berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.

Adapun realisasi dari program prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Berau yang mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

No	Program Prioritas (RPJMD)	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		OPD	Realisasi 2021
			2020	2021		
1	Program Peingkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Pembahasan Rancangan Peraturan daerah Yang disetujui	75%	75%	Setwan	80%

3. Realisasi Anggaran Berdasarkan DPPA Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021

No		Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.571.002.824	37.815.439.854
	I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	146.620.500	115.534.000
	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	146.620.500	115.534.000
	2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.777.675.241	7.946.505.288
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.699.833.333	6.3060.446.522
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.077.842.088	1.886.058.766
	3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.340.393.300	74.954000

	1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80.400.000	74.954.000
	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.259.993.300	
	4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.574.499.400	2.463.562.020
	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	33.470.000	33.233.000
	2	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	639.816.000	630.336400
	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000	9.075.000
	4	Penyediaan bahan logistik kantor	425.684.500	363.29.820
	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	205.993.700	201.250.300
	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.259.353.200	1.225.937.500
	5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.633.737.700	1.538.461.678
	1	Penyediaan surat menyurat	4.200.000	2.490.000
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	753.360.000	666.475.378
	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	233.615.700	227.355.600
	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	642.562.000	642.140.700
	6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.231.442.200	1.164.779.425
	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	795.410.200	742.430.025
	2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	278.016.000	271.546.000
	3	Pemeliharaan asset tetap lainnya	158.016.000	150.803.400
	7	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	20.736.913.103	17.976.351.871
	1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	19.890.482.703	17.344.283.36
	2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	182.136.000	181.167.000
	3	Pelaksanaan medical check up DPRD	664.294.4000	450.901.735
	8	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	7.129.721.200	6.535.291.572
	1	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	5.218.322.000	4.661.170.372
	2	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	1.911.399.200	1.874.121.200

II		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18.466.643.616	14.142.475.031
		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	3.599.370.400	2.177.700.988
	1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	3.599.370.400	
	2	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	2.060.041.000	1.907.950.320
	1	Pembahasan KUA dan PPAS	95.039.600	66.135.700
	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	95.046.600	82.255.100
	3	Pembahasan APBD	1.224.988.000	1.203.999.346
	4	Pembahasan APBD Perubahan	474.992.200	428.632.398
	5	Pembahasan Laporan semester	19.980.800	6.720.000
	6	Pembahasan pertanggungjawaban	149.993.800	120.207.776
	3	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	2.723.758.116	1.697.643.356
	1	Bimbingan Teknis	1.898.925.000	1.084.302.984
	2	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	469.899.016	435.386.372
	3	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	324.960.300	157.434.000
	4	Penyusunan program kerja DPRD	29.983.800	20.520.000
	4	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	4.643.963.100	3.172.386.932
	1	Kunjungan kerja dalam daerah	580.869.500	157.200.500
	2	Pelaksanaan reses	4.063.093.600	3.015.186.432
	5	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	189.995.200	167.247.929
	1	Pengawasan kode etik DPRD	189.995.200	167.4247.29
	6	FASILITASI TUGAS DPRD	5.249.505.800	5.019.545.506
	1	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	4.032.743.900	3.928.601.348
	2	Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	916.942.600	859.475.465
	3	Fasilitasi tugas impinan DPRD	299.819.300	231.468.693

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan DPPA OPD

Tahun 2021

Capaian kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan DPPA Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021

No		Program dan Kegiatan	Rencana Kinerja	Realisasi Kinerja
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		
		1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	10
	2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	121	75
	3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		
		1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	116	110
		2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	30	-
	4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		
		1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10	12
		2 Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	66	8
		3 Penyediaan peralatan rumah tangga	3	1
		4 Penyediaan bahan logistik kantor	3	3
		5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18	18
		6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		8
	5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
		1 Penyediaan surat menyurat	200	200
		2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12
		3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	40	36
		4 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	15	15

	6		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
		1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	48	40
		2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10	10
		3	Pemeliharaan asset tetap lainnya	1	1
	7		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD		
		1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	12	12
		2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	150	150
		3	Pelaksanaan medical check up DPRD	30	27
	8		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD		
		1	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	224	812
		2	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	3	3
	II		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
		1	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD		
		1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	20	25
		2	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN		
		1	Pembahasan KUA dan PPAS	2	2
		2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3	3
		3	Pembahasan APBD	3	19
		4	Pembahasan APBD Perubahan	4	4
		5	Pembahasan Laporan semester	1	1
		6	Pembahasan pertanggungjawaban	2	4
		3	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD		
		1	Bimbingan Teknis	3	3
		2	Penyediaan tenaga ahli fraksi	7	7
		3	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	30	40
		4	Penyusunan program kerja DPRD	1	1
	4		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT		

		1	Kunjungan kerja dalam daerah	234	194
		2	Pelaksanaan reses	3	3
	5		PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD		
		1	Penyusunan kode etik DPRD	1	1
	6		FASILITASI TUGAS DPRD		
		1	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	182	694
		2	Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	35	26
		3	Fasilitasi tugas impinan DPRD	5	5

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program penunjang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD maupun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan.

Pelaksanaan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 43.571.002.824 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 37.815.439.854 dengan persentase 86,79%.. Indikator dari program ini adalah (Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik) dengan target 100%.

Realisasi Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

No		Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.571.002.824	37.815.439.854	86,79			
	I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	146.620.500	115.534.000	78,80			

		1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	146.620.500	115.534.000	78,80	10	10	100
	2		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.777.675.241	7.946.505.288	90,53			
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.699.833.333	6.3060.446.522	90,46	14	14	100
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.077.842.088	1.886.058.766	90,77	121	75	61
	3		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.340.393.300	74.954.000	5,59			
		1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80.400.000	74.954.000	93,23	116	110	94
		2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.259.993.300		-	30	-	
	4		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.574.499.400	2.463.562.020	95,69			
		1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	33.470.000	33.233.000	99,29	10	12	120
		2	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	639.816.000	630.336.400	98,52	8	8	100
		3	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000	9.075.000	90,75	3	1	33
		4	Penyediaan bahan logistik kantor	425.684.500	363.29.820	85,45	3	3	100
		5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	205.993.700	201.250.300	97,70	18	18	100
		6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.259.353.200	1.225.937.500	97,33	8	8	100
	5		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.633.737.700	1.538.461.678	94,17			
		1	Penyediaan surat menyurat	4.200.000	2.490.000	59,29	200	200	100
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	753.360.000	666.475.378	88,47	12	12	100
		3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	233.615.700	227.355.600	97,32	40	36	90
		4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	642.562.000	642.140.700	99,93	15	15	100
	6		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.231.442.200	1.164.779.425	94,59			
		1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	795.410.200	742.430.025	93,34	48	40	83
		2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	278.016.000	271.546.000	97,67	10	10	100
		3	Pemeliharaan asset tetap lainnya	158.016.000	150.803.400	95,44			

	7	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	20.736.913.103	17.976.351.871	86,69			
		1 Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	19.890.482.703	17.344.283.36	87,20	12	12	100
		2 Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	182.136.000	181.167.000	99,47	150	150	100
		3 Pelaksanaan medical check up DPRD	664.294.4000	450.901.735	67,88	30	27	90
	8	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	7.129.721.200	6.535.291.572	91,66			
		1 Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	5.218.322.000	4.661.170.372	89,32	424	812	191
		2 Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	1.911.399.200	1.874.121.200	98,05	3	3	100

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan program inti yang berisikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan.

Pelaksanaan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 18.466.643.616 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 14.142.475.031 dengan persentase 76.58%,. Indikator dari program ini adalah (prosentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD) dengan target 100%.

Realisasi Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18.466.643.616	14.142.475.031	76,58			
	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	3.599.370.400	2.177.700.988	76,58			
	1 Pembahasan rancangan peraturan daerah	3.599.370.400		60,50	20	25	125
	2 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	2.060.041.000	1.907.950.320	92,62			
	1 Pembahasan KUA dan PPAS	95.039.600	66.135.700	69,59	2	2	100

	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	95.046.600	82.255.100	86,54	3	3	100
	3	Pembahasan APBD	1.224.988.000	1.203.999.346	98,29	3	19	633
	4	Pembahasan APBD Perubahan	474.992.200	428.632.398	90,24	4	4	100
	5	Pembahasan Laporan semester	19.980.800	6.720.000	33,63	1	1	100
	6	Pembahasan pertanggungjawaban	149.993.800	120.207.776	80,14	2	4	200
3		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	2.723.758.116	1.697.643.356	62,33			
	1	Bimbingan Teknis	1.898.925.000	1.084.302.984	57,10	3	3	100
	2	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	469.899.016	435.386.372	92,66	7	7	100
	3	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	324.960.300	157.434.000	48,45	30	40	133
	4	Penyusunan program kerja DPRD	29.983.800	20.520.000	68,44	1	1	100
4		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	4.643.963.100	3.172.386.932	68,31			
	1	Kunjungan kerja dalam daerah	580.869.500	157.200.500	27,06	234	194	82
	2	Pelaksanaan reses	4.063.093.600	3.015.186.432	74,21	3	3	100
5		PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	189.995.200	167.247.929	88,03			
	1	Pengawasan kode etik DPRD	189.995.200	167.4247.29	88,03	1	1	100
6		FASILITASI TUGAS DPRD	5.249.505.800	5.019.545.506	95,62			
	1	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	4.032.743.900	3.928.601.348	97,42	182	694	381
	2	Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	916.942.600	859.475.465	93,73	35	26	74
	3	Fasilitasi tugas impinan DPRD	299.819.300	231.468.693	77,20	5	5	100

5. Permasalahan dan Solusi

A	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang telah dilatih atau mendapatkan pelatihan khusus dalam penyusunan	- Perlu pelatihan dalam penyusunan dokumen perencanaan - Dalam hal aturan yang mengalami	- Secara mandiri mencari informasi kepada dinas/OPD yang telah menyelesaikan dokumen tersebut

		<p>dokumen-dokumen perencanaan</p> <p>- Berubahnya aturan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen</p>	<p>perubahan, sekiranya kita perlu belajar lagi ke daerah yang telah menerapkan dan lebih dahulu melaksanakan</p>	<p>- Melaksanakan konsultasi kepada Daerah lain untuk mendapat informasi yang tepat dan sesuai aturan yang baru</p>
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
	<p>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p>		-	-
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
	<p>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p>	<p>- Masih kurangnya penjahit/ penyedia jasa yang memiliki persyaratan yang sesuai diperlukan dalam pengerjaan paket pekerjaan pembuatan pakaian dinas harian, sehingga membuat kesulitan dalam mencari perbandingan antara penyedia jasa</p>	<p>- Perlu pembinaan kepada para penyedia oleh dinas terkait akan pentingnya surat izin usaha serta kelengkapannya sehingga para penyedia dapat mendapatkan paket-paket pekerjaan dari instansi pemerintah</p>	<p>- Pengadaan langsung dilaksanakan hanya kepada penyedia yang memiliki izin usaha yang lengkap</p>
	<p>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p>	-	-	-
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
	<p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p>	-	-	-
	<p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p>	<p>- Sesuai dengan Perpres No 12 Thn 2021 tentang perubahan atas Perpres No 16 Thn</p>	<p>- Perlu penambahan anggaran khusus kepada Pejabat Pembuat</p>	<p>- Melaksanakan Survey melalui Penyedia online yang terpercaya</p>

		<p>2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, KPA/PPK dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diharuskan untuk melakukan survey pasar untuk dijadikan dasar dalam menetapkan HPS, akan tetapi pada rekening penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor maupun anggaran sekretariat DPRD tidak terdapat anggaran khusus untuk melaksanakan survey pasar, sementara barang yang tidak tersedia didalam daerah kadang mengharuskan kita untuk melaksanakan survey ke luar daerah.</p>	<p>Komitmen (PPK) untuk melakukan survey harga ke luar daerah</p>	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	- Tidak tersedianya anggaran yang	- Penambahan Pagu Anggaran	- Dilaksanakan dengan anggaran

	Perundang-undangan	cukup sehingga kegiatan berlangganan surat kabar/Koran dihentikan per 30 juni 2021 dan dilanjutkan kembali setelah ditetapkan APBD Perubahan - Anggaran belanja jasa publikasi secara umum masih kurang mengingat intensitas kegiatan DPRD yang cukup tinggi ditambah lagi banyaknya media yang memerlukan pembinaan	- Penambahan Pagu Anggaran	yang ada , namun dengan menambahkan anggaran yang kurang tersebut pada saat ABT Perubahan - Dilaksanakan dengan anggaran yang tersedia
5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Belanja jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi pada Sekretariat DPRD lelang dilaksanakan diawal tahun, sehingga memerlukan waktu untuk proses lelang memerlukan 45 hari dikarenakan mengalami beberapa kali	- - Diharapkan adanya alokasi khusus untuk rehap sedang berat gedung kantor dari dinas terkait	- Telah melayangkan surat kepada dinas terkait mengenai rehab kantor DPRD Kabupaten Berau

		<p>perubahan dalam proses pelelangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam proses berjalannya jasa kebersihan kantor mengalami beberapa kendala dalam pembersihan terutama pada lantai 1 dan 2 karena ada beberapa tempat yang mengalami kerusakan pada atap dan dak sehingga walaupun pihak ketiga telah melaksanakan pekerjaan secara maksimal dan sesuai SOP yang ditetapkan hasil yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan harapan terutama saat terjadi hujan 		
6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Asuransi Barang Milik Daerah menggunakan rete atas Asuransi, dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya berita acara serah terima barang/jasa sehingga dapat 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan dengan anggaran dan situasi keadaan yang ada dengan mengikuti

		hanya sesuai dengan aset yang terdapat di KIB sekretariat DPRD kab. Berau sementara untuk pekerjaan rehap dan pengadaan barang yang telah diadakan oleh dinas Pekerjaan Umum belum dapat dimasukkan ke KIB dikarenakan belum adanya penyerahan barang dan Pekerjaan Kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau	dituangkan dalam KIB sekretariat DPRD Kabupaten Berau	peraturan yang berlaku
7	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD			
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	- Harga standarisasi untuk Pakaian Dinas DPRD dinilai masih terlalu rendah sehingga beberapa penyedia tidak bersedia untuk mengikuti proses pengadaan pakaian dinas yang akan diadakan	Mengadakan pakaian dinas DPRD dengan standar harga yang ada	Menyesuaikan harga standarisasi Pemerintah daerah kab. Berau
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		-	-
8	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD			
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-	-	-
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			

1	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD			
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadinya pembatalan rapat DPRD yang sudah terjadwal sebelumnya - Tidak efisiennya anggaran konsumsi - Sering terjadi rapat mendadak 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana kerja DPRD Tahunan - Memberi masukan kepada Pimpinan DPRD untuk lebih memperhatikan tahapan-tahapan penyusunan Propemperda 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi masukan ke pada Pimpinan melalui Sekretaris DPRD
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	-	-	-
2	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN			
	Pembahasan KUA dan PPAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadinya pembatalan rapat DPRD yang sudah terjadwal sebelumnya - Tidak efisiennya anggaran konsumsi - Sering terjadi rapat mendadak 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana kerja DPRD Tahunan - Memberi masukan kepada Pimpinan DPRD untuk lebih memperhatikan tahapan-tahapan penyusunan KUA dan PPAS 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi masukan ke pada Pimpinan melalui Sekretaris DPRD
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadinya pembatalan rapat DPRD yang sudah terjadwal sebelumnya - Tidak efisiennya anggaran konsumsi - Sering terjadi rapat mendadak 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana kerja DPRD Tahunan - Memberi masukan kepada Pimpinan DPRD untuk lebih memperhatikan perubahan KUA dan PPAS 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi masukan ke pada Pimpinan melalui Sekretaris DPRD

	Pembahasan APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlaksananya kegiatan rapat-rapat Banggar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan yang disebabkan adanya perubahan jadwal kegiatan DPRD yang sering terjadi secara tiba-tiba - Pembatalan rapat yang sudah terjadwal akan berdampak pada tertundanya agenda-agenda lainnya termasuk agenda pembahasan dan penetapan APBD/APBDP 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana kerja DPRD Tahunan - Memberi masukan kepada Pimpinan DPRD untuk lebih memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi masukan ke pada Pimpinan melalui Sekretaris DPRD
	Pembahasan APBD Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlaksananya kegiatan rapat-rapat Banggar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan yang disebabkan adanya perubahan jadwal kegiatan DPRD yang sering terjadi secara tiba-tiba - Pembatalan rapat yang sudah terjadwal akan berdampak pada tertundanya agenda-agenda lainnya termasuk agenda pembahasan dan penetapan APBD 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana kerja DPRD Tahunan - Memberi masukan kepada Pimpinan DPRD untuk lebih memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi masukan ke pada Pimpinan melalui Sekretaris DPRD
	Pembahasan Laporan Semester	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlaksananya kegiatan rapat- 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana kerja DPRD Tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi masukan ke pada Pimpinan

		rapat sesuai jadwal yang sudah ditetapkan yang disebabkan adanya perubahan jadwal kegiatan DPRD yang sering terjadi secara tiba-tiba		melalui Sekretaris DPRD
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadinya pembatalan rapat DPRD yang sudah terjadwal sebelumnya - Tidak efisiennya anggaran konsumsi - Sering terjadi rapat mendadak 	- Penyusunan Rencana kerja DPRD Tahunan	- Memberi masukan kepada Pimpinan melalui Sekretaris DPRD
3	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD			
	Bimbingan Teknis DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat anggota DPRD yang belum mengikuti Orientasi yang diwajibkan berdasarkan permendagri no. 133 thn 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/kota - Padatnya kegiatan Anggota DPRD, sehingga pelaksanaan Bimtek tidak dapat terjadwal dengan pasti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencari jadwal Orientasi DPRD ke daerah lain - Menjadwalkan kembali kegiatan Bimtek dengan memperhatikan kegiat-kegiatan yang lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencari informasi ke daerah lain apabila ada kegiatan orientasi Pendalaman tugas bagi Anggota DPRD - Telah menjadwalkan kembali disela-sela padatnya kegiatan anggota DPRD
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	-	-	-
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-	-	-

	Penyusunan Program Kerja DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan ini merupakan rencana kerja DPRD untuk jangka waktu satu tahun anggaran sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan dan anggota DPRD, namun kegiatan ini baru ada setelah perubahan penganggaran dari SIMDA ke SIPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kembali rencana kerja DPRD semaksimal mungkin - Perlu pembelajaran dan pelatihan yang tepat bagi anggota DPRD mengenai program kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat dokumen pelaksanaan Program kerja DPRD - Penambahan Anggaran pada tahun berikutnya agar anggota DPRD dapat mendapat pelatihan mengenai program kerja
4	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT			
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	-	-	-
	Pelaksanaan Reses	-	-	-
5	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD			
	Penyusunan Kode Etik DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadinya pembatalan rapat DPRD yang sudah terjadwal sebelumnya - Tidak efisiennya anggaran konsumsi - Sering terjadi rapat mendadak 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana kerja DPRD Tahunan - Memberi masukan kepada Pimpinan DPRD untuk lebih memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi masukan kepada Pimpinan melalui Sekretaris DPRD
6	FASILITASI TUGAS DPRD			
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan ini terkadang tidak ter agendakan didalam BAMUS setiap bulannya, dikarenakan disesuaikan dengan undangan dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan dengan kegiatan DPRD dan BAMUS 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan dengan kegiatan DPRD setiap bulan

		kegiatan yang dilaksanakan		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	<ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadinya pembatalan rapat DPRD yang sudah terjadwal sebelumnya - Tidak efisiennya anggaran konsumsi - Sering terjadi rapat mendadak 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana kerja DPRD Tahunan - Memberi masukan kepada Pimpinan DPRD untuk lebih memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi masukan kepada Pimpinan melalui Sekretaris DPRD
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan ini terkadang tidak teragendakan didalam BAMUS setiap bulannya, dikarenakan disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan pimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan dengan kegiatan DPRD dan BAMUS 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan dengan kegiatan DPRD setiap bulan
LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD				
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Harga standarisasi untuk Pakaian Dinas DPRD dinilai masih terlalu rendah sehingga beberapa penyedia tidak bersedia untuk mengikuti proses pengadaan pakaian dinas yang akan diadakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan pakaian dinas DPRD dengan standar harga yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan harga standarisasi Pemerintah daerah kab. Berau
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-	-	-
14	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD			
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-	-	-
	Penyediaan Kebutuhan Rumah			

	Tangga DPRD			
--	-------------	--	--	--

BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau tahun 2021 tidak ada tugas pembantuan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- 1. Kerjasama Antar Daerah (Mou OPD Kabupaten Berau dengan OPD Pemkab/Pemkot Propinsi Kaltim, Pemprop. Kaltim, Pemkab/Pemkot/Pemprop. Luar Kaltim dan Pusat) yang berlaku s.d Tahun 2021 yang terdiri dari :**

Sekretariat DPRD Kabupaten Berau tidak melaksanakan kerjasama antar daerah selama tahun anggaran 2021.

- 2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Mou OPD Kabupaten Berau dengan Pihak Ketiga)**

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Mou OPD Kabupaten Berau dengan Pihak Ketiga) yang berlaku s.d Tahun 2021, yaitu :

- A. Kerjasama tentang Pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Berau Periode 2019-2024

- a. Kebijakan dan Kegiatan :

Mitra yang diajak kerjasama : Universitas Pasundan

Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/579/set.DPRD-II/IX/2021 tanggal 24 September 2021

Bidang Kerjasama : Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD Kabupaten Berau

Nama Kegiatan : Kerjasama tentang Pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Berau Periode 2019-2024.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada anggota DPRD yang baru dilantik terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga legislatif.
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada DPRD Kabupaten Berau

c. Permasalahan dan Solusi

- Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama dan Kegiatan berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah Pada Tahun 2021 yang terdiri dari :

Koordinasi ini dilakukan dalam kegiatan yang melibatkan instansi vertikal di Kabupaten Berau, khusus untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Berau yaitu dibidang hukum untuk kegiatan kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Berau dan dengan Pemda Berau dalam rangka Kerjasama Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021.

A. Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Berau

a. Kebijakan dan Kegiatan :

Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dengan Kejaksaan Negeri Berau

Nomor Pihak Pertama : 02/KSPKT/DPRD/2021

Nomor Pihak Kedua :B-263/0.4.14/Gs.1/02/2021

Tanggal 19 Maret 2021

Bidang Kerjasama : Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya.

- b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - Memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) serta memberikan layanan konsultasi hukum di bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara kepada Pihak Pertama.
- c. Permasalahan dan Solusi

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama dan kerjasama berjalan dengan baik.

B. Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Berau

Kebijakan dan Kegiatan :

Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dengan Kejaksaan Negeri Berau

Nomor Pihak Pertama : 02/KSPKT/DPRD/2021

Nomor Pihak Kedua :B-262/0.4.14/Gs.1/02/2021

Tanggal 19 Maret 2021

Bidang Kerjasama : Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya.

- b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - Memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) serta memberikan layanan konsultasi hukum di bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara kepada Pihak Pertama.
- c. Permasalahan dan Solusi

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama dan kerjasama berjalan dengan baik.

BAB V PRESTASI

Pada Sekretariat DPRD kabupaten Berau tidak ada prestasi yang diraih untuk skala internasional, nasional maupun propinsi.

**BAB VI
PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disusun berdasarkan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2021 mencakup penyelenggaraan urusan umum pemerintahan.

Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2021 menjadi masukan bagi pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya.

Demikian penyampaian LKPJ Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 ini disusun, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Berau. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.

Tanjung Redeb, 17 Januari 2022

SEKRETARIS DPRD

HJ. EVA YUNITA, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680926 199503 2 001